

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut (Undang Undang Republik Indonesia, 2009) Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya

Kemiskinan sudah menjadi sesuatu permasalahan pokok sejak dahulu, meskipun zaman dahulu makna kemiskinan merupakan bentuk minimnya kemudahan ataupun materi. Sedangkan zaman saat ini, makna kemiskinan merupakan representasi dari kesulitan dalam mendapatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu aspek penting yang menjadi perhatian pemerintah sejak dulu hingga saat ini. Setiap tahun, Indonesia terus mengalami lonjakan kemiskinan. Kemiskinan akan menimbulkan ketimpangan dilingkungan masyarakat apabila tidak segera ditangani dengan baik dengan strategi yang sesuai dan tepat sasaran, hingga akhirnya negara akan mengalami *chaos* dan akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks lagi seperti stunting, pengangguran, ketimpangan dan berbagai permasalahan lainnya.

Semakin meningkatnya permasalahan kemiskinan, akhirnya akan timbulnya gelandangan dan pengemis. Permasalahan yang muncul akibat adanya gelandangan dan pengemis akan menghambat pembangunan perkotaan, dikarenakan semakin banyaknya jumlah gelandangan menjadi indikator semakin buruknya tatanan kota tersebut hal tersebut bermakna bahwa pemerintah harus menangani permasalahan itu terlebih dahulu.

Gelandangan dan pengemis merupakan suatu kehidupan manusia yang diartikan masyarakat yang tidak berdaya, terasing, lemah, dan kurang mendapatkan tempat di tatanan pergaulan masyarakat kelompok

berpenyakit sosial. Sebagian orang dengan ekonomi yang rendah menganggap bahwa menjadi gelandangan dan pengemis merupakan cara yang paling tepat untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas gelandangan dan pengemis dilakukan karena minimnya keterampilan dan pendidikan yang dimiliki.

Adanya gelandangan dan pengemis juga menyebabkan timbulnya citra buruk suatu bangsa. Semakin bertambahnya jumlah gelandangan dan pengemis yang tidak terkendali akan memunculkan pertanyaan mengenai kesejahteraan di bangsa tersebut. Dampak lainnya yaitu akan meningkatkan tuna susila dinegara tersebut karena merasa tidak lagi dihargai di lingkungannya dan menggaap tidak ada yang memperhatikan lagi.

Gelandangan dan pengemis merupakan perwujudan dari entitas kelompok masyarakat yang sangat rentan dari segi keadaan ekonomi karena berada dalam kondisi sub marginal (Setiawan, 2020). Gelandangan dan pengemis biasanya melakukan aktifitasnya di lingkungan yang ramai dan banyak dikunjungi. Semakin banyaknya pengemis dan gelandangan di lingkungan tersebut akan membuat pemandangan yang terkesan tidak rapi dan akan dianggap kurang mampu dalam mengelola lingkungan tersebut. Orang yang memiliki prinsip bahwa pengemis merupakan jalan hidupnya cenderung malas untuk melanjutkan pendidikan. Apabila dibiarkan pola pikir inilah yang akan menyebabkan negara akan sulit untuk maju dalam aspek perekonomian.

Pemerintah selaku penanggung jawab atas seluruh permasalahan yang timbul di masyarakat harus memberikan terobosan baru dalam upaya pengentasan permasalahan gelandangan dan pengemis. Pengentasan keberadaan gelandangan dan pengemis merupakan salah satu parameter keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerjanya dan dapat meningkatkan citra pemerintah daerah dimata masyarakat.

Adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan Dinas Sosial dalam penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis merupakan bentuk nyata dalam penanganan permasalahan ini. Dinas sosial yang turut

mengambil peran dalam pengoperasian setiap sistem yang telah dibuat harus bisa menjalankannya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan. Penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial diharapkan mampu menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat dan para gelandangan dan pengemis.

Tabel 1.1 Rasio Penanganan PMKS Tahun 2018-2020

NO	Indikator	Satuan	Target Tahun			Realisasi Capaian pada Tahun			Rasio Capaian pada Tahun (%)		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	%	73.8	78.79	78.79	69.61	59.14	59.43	69,61	75,06	75,42
2	Persentase PMKS yang tertangani	%	81.22	86.79	96.79	80.13	82.21	59.82	98.65	94,72	61,80
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan Sosial	%	5.07	10.07	10.07	40.93	9.07	5.42	96.64	90,06	53,82

Sumber: Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur 2021-2026

Pada pemaparan data diatas, presentase penanganan mengenai permasalahan sosial yang didalamnya terdapat komponen penanganan terhadap gelandangan dan pengemis, menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dapat dikatakan mampu dalam menangani permasalahan social.

Kepala Dinas Sosial Kutai Timur Jamiatul Khair mengatakan bahwa permasalahan gelandang dan gepeng sebenarnya ad tetapi, pihaknya cepat menangani hal tersebut, terutama pada 2017 lalu. Dinsos Kutim membuat

langkah penanganan PMKS ini dilansir dari wartaberita online nomorsatukaltim.co.id.

“Kami buat berbagai strategi. Termasuk menyiapkan payung hukumnya melalui Perbup,” (Jamiatul akhir, 2021).

Kabupaten Kutai Timur sebagai salah satu wilayah dengan sektor pertambangan yang besar tetapi permasalahan gelandangan dan pengemisnya masih banyak terutama pada tahun 2016, jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Kutai Timur berjumlah 51 orang. Faktor ini yang menyebabkan Dinas Sosial perlu fokus dalam permasalahan penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 1.2 Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kalimantan Timur
Tahun 2017-2020

No	Tahun	Kutai Timur	Kutai Barat	Kutai Kartanegara
1.	2017	37	23	21
2.	2018	32	26	17
3.	2019	13	9	4
4.	2020	8	6	6

Sumber : Dinas Sosial Kalimantan Timur, 2020

Berdasarkan data diatas, jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten Kutai Timur lebih banyak dibandingkan dua Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kutai Timur sampai mengeluhkan akibat kewalahan dalam menangani keberadaan gelandangan dan pengemis yang terus bertambah terutama ketika Ramadhan menjelang. Meskipun demikian, Satpol PP Kabupaten Kutai Timur tetap melaksanakan kewajibannya dalam memberantas keberadaan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kutai Timur. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu

wilayah dari Provinsi Kalimantan Timur dengan sumber daya utamanya adalah batubara yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kutai Timur. Dengan perspektif bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di Kutai Timur memiliki hidup yang terjamin karena hampir seluruh masyarakatnya bekerja di sektor pertambangan. Namun fenomena yang terjadi adalah mengenai permasalahan kesejahteraan sosial terutama gelandangan dan pengemis yang tidak akan pernah hilang meskipun banyak masyarakat yang bekerja di sektor pertambangan. Program-program yang dapat meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Kutai Timur tentunya akan menciptakan Kota yang tenang dan asri. Disinilah peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan agar terciptanya masyarakat yang memiliki taraf kehidupan yang baik dan sejahtera.

Tabel 1.3 Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2020

Tahun	2018	2019	2020
Jumlah	32 Orang	13 Orang	8 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan diatas, menunjukkan bahwa selama rentan tahun 2018 hingga 2020 jumlah gelandangan dan pengemis di Kabuten Kutai Timur mengalami penurunan. Faktor penyebab menurunnya angka gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kutai Timur dikarenakan mayoritas gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat yang berasal dari luar pulau Kalimantan. Penangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam mengatasi gelandangan dan pengemis yang berasal daru luar pulau Kalimantan yaitu dengan cara memfasilitasi proses kepulangan gelandangan atau pengemis tersebut untuk kembali ke kampung halamannya.

Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur yang mengambil peran atas permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kutai Timur serta

diharapkan mampu memberikan kontribusinya dengan menjalankan program yang telah diamanatkan oleh pemerintah daerah dengan maksimal sehingga keberadaan gelandangan dan pengemis mengalami penurunan dibantu dengan pembinaan yang baik agar gelandangan dan pengemis yang telah keluar dari tempat rehabilitasi dan mendapatkan pembinaan baik pekerjaan maupun keterampilan, dapat menggunakan ilmunya untuk bekerja.

Tabel 1.4 Penyanggah masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Timur

No	Uraian	2015	2016	2017
1.	Rasio penyanggah masalah kesejahteraan sosial yang tertangani (%)	87,00%	54,43%	34,49%

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018

Adanya sub bagian Rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur berfungsi untuk mengurus segala permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Timur termasuk gelandangan dan pengemis. Adanya rumah rehabilitasi yang didirikan untuk menampung anak jalanan, pengemis, dan gelandangan yang berada di Kutai Timur diharapkan dapat digunakan dengan maksimal dan terstruktur dengan baik. Adapun regulasi yang mengatur mengenai program penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kutai Timur yaitu, Peraturan Gubernur Tentang Penanganan PMKS Nomor 3 Tahun 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, untuk mengetahui keefektivan program Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam penanganan gelandangan dan pengemis, maka penelitian ini mengajukan sebuah pertanyaan; Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penanganan permasalahan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2018 hingga 2020. Penelitian ini berfokus di studi kasus di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur sebagai perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap program tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang ilmu pemerintahan dan untuk mengetahui seberapa efektifnya program Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kutai Timur. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah guna menginovasi program-program dan meningkatkan strategi kedepannya agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar.

b. Bagi Aparatur Sipil Negara

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kutai Timur guna meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap program penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kutai Timur.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian	Link Jurnal
1.	Iza Zuhriah (2019)	Efektivitas Kebijakan	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh	Thesis

		<p>Pemerintah Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Studi Pada Dinas Sosial Kota Jambi</p>	<p>mana Dinas Sosial Kota Jambi dalam menangani gelandangan dan pengemis di kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan metode pengumpulan data, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah pertama, untuk mengetahui regulasi penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Jambi. Kedua, untuk mengetahui tentang efektivitas penanganan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Jambi. Ketiga, untuk mengetahui apasaja faktor yang menghambat efektivitas penangan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Kota Jambi.</p>	<p>http://repository.uinjambi.ac.id/2381/</p>
2.	Tamliha Harun (2018)	<p>Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Di Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar (Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang</p>	<p>Berdasarkan Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dijelaskan bahwa pencegahan merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan semakin</p>	<p>No. Jurnal 2, Volume. 3, https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/article/view/2086/1721</p>

		Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis)	banyak macam permasalahan yang muncul. Upaya yang dilakukan untuk pencegahan ialah dilakukannya pendataan, pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, sosialisasi, dan penyuluhan. Dinas Sosial Kabupaten Banjar telah melakukan tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan Perda Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis khususnya di Kecamatan Martapura Kota. Upaya tersebut diantaranya upaya pencegahan (Preventif), upaya penanggulangan (Represif), dan upaya rehabilitasi (rehabilitatif).	
3.	Il Sumantri, Faizal Pikri, Muhammad Aldi Lubis (2018)	Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Rehabilitasi Sosial Provinsi Jawa Barat. Selain itu, penting juga untuk mengetahui proses pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Rehabilitasi Sosial terhadap gelandangan yang telah mengikuti program rehabilitasi. Metode yang	No. Jurnal 1, Volume. 10, https://journal.uin-sgd.ac.id/index.php/publica/article/view/7622/3763

			<p>digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara utuh tentang efektifitas program rehabilitasi sosial Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum program kegiatan yang diadakan di Balai Rehabilitasi sangat berpengaruh terhadap klien, meskipun sedikit perubahan yang dialami oleh klien. Pada dasarnya dari sekian banyak program yang diadakan di balai, yang paling berpengaruh terhadap kehidupan klien tersebut adalah kegiatan keterampilan.</p>	
4.	Immanuel Jaya (2019)	Implementasi Kebijakan Penanganan Gelandangan, Pengemis, Tuna Susila Dan Anak Jalanan Di Kota Palangka Raya	Secara general, Dinas Sosial Kota Palangka Raya dinilai sudah melakukan Tupoksi dalam hal melaksanakan penanganan terhadap gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan di Kota Palangkaraya. Teori yang dijadikan cakupan keberhasilan kebijakan	No. Jurnal 1, Volume 8, https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/612/1861

			<p>penanganan gelandangan, pengemis, tuna susila dan anak jalanan adalah teori Edward III yang menyatakan bahwa kebijakan akan berjalan dengan baik ataupun terhambat apabila dipengaruhi oleh empat indikator yaitu : Komunikasi, sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.</p>	
5.	Samsul Bahri (2015)	<p>Strategi Komunikasi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda Dalam Mengurangi Pengemis Di Kota Samarinda</p>	<p>Pertumbuhan anak jalanan, pengemis, dan gelandangan di Kota Samarinda semakin banyak. Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda kemudian menggunakan strategi komunikasi dengan tujuan dapat menurunkan jumlah penyandang tuna sosial di Kota Samarinda, adapun komponen yang terkandung dalam strategi komunikasi oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda yaitu : larangan mengemis, pembinaan dan pengarahan, penyampaian informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, efek jera berupa pidana dan membayar denda. Pemerintah Kota Samarinda juga memberikan pembinaan keterampilan dasar agar pengemis dapat</p>	<p>No. Jurnal 2, volume 3, https://123dok.com/document/y8r8kl5q-strategi-komunikasi-kesejahteraan-menangani-penyandang-masalah-kesejahteraan-samarinda.html</p>

			menggunakan ilmunya selama di rehabilitasi di Panti sosial.	
6.	Annisa Rahmadanita (2019)	Pembinaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis)	Berdasarkan metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>) menghasilkan analisis berupa pembinaan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya : 1. Pemerintah daerah perlu menyusun perlu membuat dan menyusun regulasi mengenai penertiban gelandangan dan pengemis, 2. Perlu adanya data yang konkrit dan real yang dimiliki oleh pemerintah daerah mengenai kondisi dan jumlah gelandangan dan pengemis, 3. Perlu adanya komunitas antara masyarakat dengan pemerintah daerah guna mendukung penertiban gelandangan dan pengemis. 4. Adanya program pendampingan dan pembinaan secara bertahap dan berkelanjutan terhadap gelandangan dan pengemis. 5. Pengevaluasian terkait program pendampingan dan pembinaan	No. Jurnal 2, Volume 1, https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1154

			gelandangan dan pengemis.	
7.	Muhammad Rasyid, Timbul Dompok (2022)	Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Batam	Rehabilitasi Sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam merupakan terobosan yang dilakukan pemerintah dalam memberantas permasalahan gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Rehabilitasi Sosial gelandangan dan pengemis di Kota Batam serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat Rehabilitasi Sosial gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas program rehabilitasi sosial pengemis tuna wisma di Kota Batam sudah berjalan cukup baik namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti kurangnya komunikasi, sumber daya. Diharapkan dengan mengetahui kelemahan-kelemahan tersebut, harus segera	No. Jurnal 6, Volume 4, https://forum.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/4774

			dibenahi agar program rehabilitasi sosial dapat berjalan dengan baik.	
8.	Vania Cynthia, Rahmadani Yusran (2021)	Evaluasi Program Desaku Menanti Dalam Penanggulan Gelandangan dan Pengemis Di Kota Padang	Desaku Menanti merupakan program rehabilitasi sosial untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis berbasis desa. Tujuan dari program ini ialah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui bantuan yang diberikan seperti rumah layak huni sementara. Dampak dari adanya Program Desaku Menanti ialah: 1. Adanya pembinaan bagi gelandangan dan pengemis yang telah lolos seleksi kemudian akan diberikan bimbingan sosial, fisik, dan mental. Tujuannya agar merubah pola pikir dan menimbulkan kesadaran diri untuk hidup mandiri tanpa meminta-minta, 2. Pelaksanaan pelatihan keterampilan, adanya program ini diharapkan warga binaan sosial mampu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, 3. Bantuan usaha dan jaminan hidup. Dampak yang dihasilkan ialah, warga binaan memiliki modal untuk membangun usaha,	No. Jurnal 1, Volume 3, http://jmiap.ppj.unp.ac.id/index.php/jmiap/article/view/191/154

			4. Bantuan bahan baku rumah, tentunya warga binaan memiliki tempat tinggal yang layak dan tidak perlu memikirkan tempat tinggal lagi.	
9.	Zainal Fadri (2019)	Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Di Yogyakarta	Maraknya pertumbuhan gelandangan dan pengemis di kota Yogyakarta memperlihatkan belum terlaksanakan dengan maksimal. Keterkaitan antara pemerintah dan swasta merupakan pihak yang berkewajiban dalam penyelesaian permasalahan gelandangan dan pengemis. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan guna upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta, yaitu : Pendekatan panti, para gelandangan dan pengemis akan disediakan tempat tinggal dengan tujuan terwujudnya komunikasi yang baik dan meniptakan motivasi agar bangkit dari kehidupan menggelandang, 2. Liponsos, merupakan singkatan dari Lingkungan Pondok Sosial. Liponsos merupakan penanganan yang menitikberatkan pada sistem hidup bersama di lingkungan sosial sebagaimana kehidupan	No. Jurnal 1, Volume 10, https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas/article/view/1070/628

			<p>masyarakat pada dasarnya, 3. <i>Transit home</i>. <i>Transit home</i> merupakan program rumah singgah sementara sebelum mendapatkan pemukiman yang tepat pada tempat yang telah disediakan, 4. Pemukiman masyarakat. Program pemukiman masyarakat merupakan bentuk penanganan dengan menyediakan tempat tinggal secara permanen di lokasi tertentu, 5. Transmigrasi. program ini merupakan cara terakhir untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis di Yogyakarta dengan cara mengirim mereka untuk ke luar daerah maupun keluar pulau untuk mengurangi kepadatan penduduk.</p>	
10.	Siti Nurul Hamidah (2019)	Program Kesejahteraan Sosial Dalam Penanggulangan Gelandangan Pengemis di Kota Serang Banten	<p>Dalam upaya perwujudan Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat dalam pelarangan kegiatan gelandangan pengemis (gepeng). Pemerintah Kota Serang melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis yang memiliki potensi menyebabkan</p>	No. Jurnal 1, Volume 5, https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/lbrmasy/article/view/2250/2913

			<p>suasana tidak aman dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keteraturan secara umum. Keberadaan lembaga sosial sangat berperan besar terhadap penanggulangan gelandangan dan pengemis. Perlu adanya kolaborasi tidak hanya dari Dinas Sosial saja namun seluruh lembaga baik pemerintah maupun swasta, guna terwujudnya kesejahteraan sosial yang menjadi tujuan dari pembangunan.</p>	
--	--	--	---	--

Dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya diatas, sebagian besar berfokus terhadap peran pemerintah daerah dan Dinas Sosial dalam penanganan gelandangan dan pengemis di daerah-daerah tertentu. Namun belum ada yang meneliti mengenai “Efektivitas Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis Pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur” sehingga penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya dan bukan merupakan hasil penelitian dari orang lain. Penelitian ini merupakan penelitian baru hasil dari pemikiran peneliti sendiri. Penelitian ini menjadi menarik karena belum ada yang meneliti mengenai keefektivan program yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam penanganan gelandang dan pengemis di Kabupaten Kutai Timur.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Efektivitas Program

Menurut (Zulfajri, 2014) Efektivitas program adalah program yang dijalankan berhasil dan berdaya guna bagi masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas merupakan daya guna, keaktifan serta terdapat kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun penjelasan mengenai efektivitas program secara detail, yaitu :

1.6.1.1 Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran untuk mencapai suatu tujuan sebagai efek atau hasil dari program yang dilaksanakan Rahmawati & Suryadi, 2019. Menurut (Mardiasmo dalam Untari, 2015) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Artinya, efektivitas merupakan alat ukur untuk menentukan apakah tujuan dalam suatu organisasi berhasil dalam mencapai tujuannya. Menurut (Pangkey & Pinatik, 2015) Efektivitas adalah suatu hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Artinya program memiliki tujuan atau sasaran memiliki kesinambungan yang harus dicapai.

Menurut (Rifa'i, 2016) Efektivitas merupakan suatu unsur pokok untuk menghasilkan tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan, maupun program. Menurut (Afriyadi, 2015) Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan menurut (Husain et al., 2015) Pengertian mengenai efektivitas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menyatakan sejauh apa target (kuantitas, waktu, dan kualitas) yang dicapai oleh manajemen, dimana target tersebut telah ditentukan terlebih dahulu. Menurut (Machmud, 2013) efektivitas adalah suatu keadaan di mana terjadi kesesuaian antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang dicapai.

(Mahmudi dalam Kesek, 2012) Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Menurut (Echols dan Shadily dalam Machmud, 2013) Efektivitas berasal dari kata “effective”, yang artinya “berhasil” atau “ditaati”. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan sangat bergantung pada kemampuan pegawai bekerja secara efektif yaitu bekerja sesuai dengan ketentuan dan mentaati setiap aturan yang dimiliki organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan. Menurut (Siagian dalam Afriyadi, 2015) Pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankan.

Terdapat beberapa indikator efektivitas menurut para ahli, Menurut (Cambel J.P dalam Astuti, 2019) Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Adapun indikator menurut (Sedarmayanti dalam Hermawan, 2017) Efektivitas kerja pegawai dapat diukur adalah tiga dimensi efektivitas yaitu :

1. Kualitas: Kualitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh persyaratan, spesifikasi, dan harapan telah dipenuhi.

2. Kuantitas: Kuantitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa banyak tugas yang telah dipenuhi.
3. Waktu: Waktu merupakan suatu ukuran yang diberikan sebagai patokan dalam menyelesaikan tugas.

Dari beberapa kata para ahli diatas yang mendefinisikan pemahaman mengenai efektivitas, Penulis menggunakan teori dari Subagyo dalam (Subagyo dalam Budiani, 2017) untuk indikator efektivitas dikarenakan teori tersebut memiliki keterkaitan dengan program-program yang telah dirancah oleh Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur, Menurut (Subagyo dalam Budiani, 2017) dalam mengukur efektivitas program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

- 1) Ketepatan sasaran program, program yang diluncurkan sudah tepat sasaran kepada pengguna program.
- 2) Sosialisasi program, mengenalkan program kepada sasaran program, sehingga target sasaran program paham program yang diluncurkan.
- 3) Tujuan program, tercapainya hasil program sesuai dengan tujuan program yang telah ditentukan.
- 4) Pemantuan program dengan efektif. Aktivitas mengecek dan memantau program agar dapat berjalan sesuai rencana yang telah di tetapkan.

1.6.1.2 Program

Menurut (Parmanda, 2019) program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa tujuan maupun harapan yang saling memiliki ketergantungan dan keterkaitan untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Menurut (Charles O, Jones dalam Parmanda, 2019) terdapat tiga hal dalam mengoperasikan suatu program yaitu :

1. Perorganisasian

Sebuah struktur organisasi yang jelas diperlukan untuk menjalankan suatu program sehingga tenaga dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten.

2. Interpretasi

Para pelaksana harus bisa menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar tujuan yang di harapkan dapat tercapai.

3. Penerapan atau Aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan dengan baik dan jadwal kegiatan tidak terbentur dengan program lain.

Menurut (Erowati, 2017) program merupakan suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang didalamnya berisikan kebijakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dikemukakan juga oleh (Erowati, 2017) bahwa program secara khusus merupakan rangkaian kegiatan secara khusus dan berkaitan dengan waktu pelaksanaan yang panjang. Selanjutnya pengertian program secara umum menurut (Suharsimi Arikunto dalam Erowati, 2017) yaitu suatu rancangan atau rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh seseorang dikemudian hari. Artinya program tersebut harus memiliki sasaran untuk kedepannya guna memberikan hasil yang sesuai dengan harapan dan tujuan dari program itu sendiri.

Selanjutnya menurut (Cakrawijaya, 2013) program adalah penjabaran dari langkah-langkah dalam pencapaian tujuan itu tersendiri. Menurut (Owen dalam Mahmudi, 2011) program merupakan serangkaian aktifitas yang direncanakan untuk melakukan perubahan-perubahan tertentu pada audiens yang telah diidentifikasi dan dapat diidentifikasi. Menurut (Mahmudi, 2011) program mempunyai dua komponen yaitu

rencana yang terdokumentasi dan aksi yang terselaraskan dengan rencana tadi.

(Korten dalam Imronah, 2009) menyatakan bahwa suatu program menjadi berhasil apabila terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi yaitu, pertama, kesesuaian antara program dengan manfaat, kedua, adanya kesesuaian anatara program dengan organisasi yang melaksanakan, ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi yang melaksanakan. Menurut (Imronah, 2009) komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan. Menurut (Oktamia & Fauziah, 2018) memperlancar kebijakan suatu program perlu adanya dukungan maupun koordinasi antar instansi yang saling berkaitan agar tidak ada kesenjangan dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan program akan berjalan dengan efektif.

Menurut Makmur dalam (Nurul Najidah, 2013) efektivitas program merupakan suatu kegiatan yang dalam proses pelaksanaannya menampakan ketepatan antara harapan yang kita ingin dapatkan dengan hasil yang di capai, dimana dibuktikan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang dicapai. Sedangkan menurut (Nurul Najidah, 2013) menyatakan bahwa efektivitas program merupakan suatu tingkatan atas perwujudan dari rumusan tujuan yang di tentukan oleh suatu kelompok, dimana didalamnya terdapat tugas-tugas pokok.

Pengukuran efektivitas suatu program di kemukakan oleh (Annas dalam Bastaman et al., 2020) yang menyatakan ukuran suatu efektivitas program yaitu :

- 1) Ketepatan Waktu yaitu program yang telah dirumuskan sebelumnya harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

- 2) Sumber daya manusia yang juga mengelola program merupakan faktor penentu dalam suatu keberhasilan program.
- 3) Mekanisme kerja, yaitu tentang bagaimana cara yang ditempuh untuk melaksanakan program berupa suatu aturan dan strategi yang ditetapkan.
- 4) Kerjasama dan komunikasi, sangat perlu dilakukan dalam melaksanakan program.
- 5) Penyaluran dana yang benar menyangkut pembiayaan program.
- 6) Tidak adanya penyimpangan dalam pelaksanaan program.
- 7) Monitoring dan evaluasi, yaitu penjelasan dalam suatu program yang sedang di laksanakan.

Efektivitas program dapat diartikan sebagai suatu tingkat perwujudan terhadap sasaran yang menunjukkan seberapa jauh sasaran program yang telah di tetapkan (Julia Sopha, 2010), artinya apabila program yang dilaksnakan telah menunjukkan sasaran yang diharapkan maka statusnya meningkat. Selanjutnya menurut (Indrayani, 2007) penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektifitas program. Berdasarkan (Ditjen Binlantas Depnaker dalam Indrayani, 2007) Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program.

Adapun teori efektivitas program menurut (Pertiwi dan Nurcahyanto dalam Utomo & Meirinawati, 2020) menyatakan bahwa indikator dari keefektivan suatu program dapat dilihat dari sosialisasi program, pemahaman program, ketepatan sasaran program, tujuan program dan perubahan yang nyata. Selanjutnya menurut Duncan dalam Amrina et al., 2021 ukuran untuk menentukan suatu efektivitas program baik program yang dillaksanakan oleh instansi pemerintahan maupun instansi swasta harus mencakup tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Menurut (Gary et al., dalam Amrina et al., 2021) menyatakan bahwa penentuan dalam sasaran akan

menentukan tingkat keberhasilan dan efektivitas program, apabila sasaran yang didapat kurang tepat maka akan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program tersebut.

Menurut (Makmur dalam Rosaliana & Hardjati, 2019) untuk mengukur suatu efektivitas program menggunakan empat indikator yaitu: ketepatan penentuan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran. Selanjutnya menurut (Starawaji dalam Listyaningsih & Wardani, 2017) untuk pengukuran efektivitas dalam suatu program dapat diukur melalui kepuasan responden terhadap suatu organisasi atau program.

1.6.2 Gelandangan dan Pengemis

Menurut (Peraturan Pemerintah RI, 1980) Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Gelandangan dan Pengemis adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Menurut (Poerwadarmintan dalam Nelson, 2008), Gelandangan merupakan orang yang hidup dalam ketidaksesuaian dengan norma dan kehidupan layak dalam bermasyarakat sekitar, dan tidak memiliki tempat tinggal serta pekerjaan yang tetap di suatu wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis, Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat-tempat umum.

Gelandangan merupakan sekumpulan orang yang hidup dalam situasi yang tidak sesuai terhadap norma kehidupan yang layak

dalam tatanan bermasyarakat sekelilingnya dan tidak memiliki mata pencaharian dan tempat tinggal yang tetap dan hidup di tempat umum. Adapun kriteria dari gelandangan berdasarkan Pasal 5 Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Kriteria dari gelandangan ialah :

- a. Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. Tanpa penghasilan yang tetap; dan/atau
- d. Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya

Kemudian, Menurut (Muthalib dan Sudjarwo dalam Jannati & Sutoyo, 2017) diberikan tiga gambaran umum gelandangan, yaitu

- (1) Sekumpulan orang miskin ataupun dimiskinkan oleh masyarakatnya,
- (2) Orang yang diasingkan dari kehidupan khalayak ramai, dan
- (3) Orang yang memiliki pola hidup agar dapat bertahan ditengah kemiskinan dan keterasingan.

Menurut (Suparlan dalam Rohman, 2010) Istilah gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. Menurut Noer Effendi (2004:114) terdapat dua faktor mengapa gelandangan kerap muncul, yaitu :

a) Faktor Eksternal :

1. Tidak mendapatkan pekerjaan,
2. Terdesak karena keadaan, seperti terkena bencana alam, peperangan,
3. Pengaruh dari orang lain.

b) Faktor Internal :

1. Kurangnya bekal pendidikan dan keterampilan,
2. Adanya rasa rendah diri, kurang percaya diri, kurangnya kesiapan untuk tinggal di kota besar,
3. Sakit jiwa, cacat tubuh.

(Wirosardjono dalam Mutaqin, 2018) juga mengatakan bahwa gelandangan merupakan lapisan sosial, ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Dengan adanya penggolongan tersebut, maka gelandangan merupakan orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal atau rumah dan pekerjaan yang tetap atau layak, berkeliaran di dalam kota, makan-minum serta tidur di sembarang tempat. Menurut (Murdianto dalam Mutaqin, 2018) ciri-ciri gelandangan adalah :

- a. Anak sampai usia dewasa tinggal di sembarang tempat dan hidup mengembara atau menggelandang di tempat-tempat umum, biasanya di kota-kota besar.
- b. Tidak mempunyai tanda pengenal atau identitas diri, berperilaku kehidupan bebas/liar, terlepas dari norma kehidupan masyarakat pada umumnya.
- c. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, meminta-minta atau mengambil sisa makanan, barang bekas dan sebagainya.

Pengemis merupakan masalah sosial yang signifikan, permasalahan yang berada di masyarakat dan menimbulkan perbedaan pendapat mengenai cara mengatasinya dan yang bertanggungjawab atas mereka. Penjelasan dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 31/1980 mendefinisikan “pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain”. Menurut (Poerwadarminta dalam Nelson, 2008), Pengemis merupakan orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara agar mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Adapun kriteria dari pengemis berdasarkan Ayat 6 Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis . Kriteria pengemis, yaitu :

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh, compang camping dan tidak sewajarnya;

- c. berada ditempat-tempat umum ; dan/atau
- d. memperlak sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Adapun kriteria pengemis menurut (Mutaqin, 2018), Seseorang bisa dikatakan sebagai pengemis dengan kriteria:

- a. Berjenis kelamin laki-laki atau perempuan yang berumur 18-59 tahun.
- b. Meminta-minta di rumah penduduk, pertokoan, tempat ibadah, persimpangan jalan, dan tempat umum lainnya.
- c. Bertingkah laku tertentu untuk mendapatkan belas kasihan orang.
- d. Biasanya memiliki tempat tinggal tertentu atau tetap dan berbaur dengan penduduk pada umumnya.

Pengemis dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban umum seperti kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak dapat dipercaya, tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut sebagai sampah masyarakat. Menurut (Suhandi & Dewi, 2020) salah satu faktor yang menyebabkan adanya pengemis ialah faktor ekonomi, Permasalahan ekonomi menyebabkan mereka harus menjalankan pekerjaan ini menjadi suatu profesi harian ataupun musiman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara berupa mengamen dan alasan lainnya untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Pengemis biasanya termasuk kedalam masyarakat menengah kebawah, sehingga hal inilah yang memunculkan asumsi bahwa faktor ekonomi yang menjadikan munculnya pengemis. Berbagai solusi dan kebijakan agar permasalahan pengemis dapat teratasi, namun solusi dan kebijakan ini dirasa tidak membuahkan hasil.

(Kepolisian Republik Indonesia, 2011) Disebutkan bahwa arti pengemis adalah seseorang yang mencari penghasilan dengan

meminta minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari pihak/orang lain dalam bentuk materi. Pengemis merupakan sekumpulan orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum dengan bermacam cara agar mendapatkan belas kasihan dari orang lain (Intel Resos, n.d.).

1.6.3 Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Masalah mengenai kesejahteraan sosial adalah suatu bagian dari masalah sosial. Sebagai contohnya, kemiskinan merupakan masalah utama yang menjadi pokok atau dasar dari permasalahan sosial. Permasalahan kemiskinan juga termasuk didalamnya berupa fakir miskin, anak dan lansia terlantar, orang dengan kecacatan, gelandangan dan pengemis (Husna, 2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu sistem kehidupan material dan spiritual dan kehidupan sosial yang penuh dengan rasa aman, moralitas, dan kedamaian internal dan eksternal, sehingga setiap orang dapat menjadi warga negara dengan memelihara hak dan kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya.

Menurut (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018) Kelompok yang mengalami permasalahan ini dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau disebut juga Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Menurut (Suleman et al., 2019) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang maupun keluarga atau sekelompok masyarakat yang karena suatu kesulitan atau hambatan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik secara jasmani, rohani, dan sosial.

Menurut (Pulungan, 2016) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat

melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Artinya suatu kelompok masyarakat yang memiliki kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai aspek disebut Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Efektivitas Program

Dari beberapa pengertian mengenai efektivitas program sebelumnya, dapat diambil pengertian bahwa efektivitas program merupakan suatu tingkatan atau pencapaian keberhasilan suatu program yang memberikan manfaat terhadap orang yang mendapatkan program tersebut. Efektivitas program juga merupakan berwujudan atas keberhasilan yang didapatkan dan menghasilkan kepuasan terhadap penerima manfaat.

Efektivitas program digunakan sebagai patokan akan tingkat keberhasilan program yang sedang berjalan dengan harapan dapat menghasilkan tingkat keberhasilan yang tinggi dan bermanfaat.

1.7.2 Efektivitas

Berdasarkan beberapa penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sebuah tolak ukur atau patokan dalam menilai suatu pencapaian program dan membandingkan dengan proses yang dilakukan dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan. Efektivitas sangat memiliki pengaruh dalam suatu penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan kesesuaian dan mengetahui hasil akhir dari penelitian tersebut.

Efektivitas juga merupakan suatu hasil untuk mencapai suatu keinginan yang diharapkan untuk memudahkan peringkasan hasil akhir. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan sehingga objek penelitian tersebut mengukurnya dengan keefektivitasan. Apabila

output yang dihasilkan semakin besar maka objek penelitian tersebut dapat dikatakan efektif.

1.7.3 Gelandangan dan Pengemis

Berdasarkan pengertian sebelumnya, gelandangan merupakan orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau nomaden berpindah-pindah tempat. Gelandangan identik dengan permasalahan kehidupan sosialnya, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri disebabkan beberapa faktor penghambat, faktor yang sering menjadi alasan mengapa seseorang disebut sebagai gelandangan ialah karena kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

Gelandangan biasanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus menjalankan kehidupan dibawah garis kemiskinan, karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gelandangan biasanya tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Wilayah yang biasanya dijadikan tempat tinggal oleh gelandangan adalah daerah-daerah yang memiliki sanitasi yang buruk, maupun daerah yang kumuh dan dapat mengancam kesehatan diri. Namun karena terkendala dalam segala aspek, secara terpaksa para gelandangan harus tinggal di wilayah tersebut.

Dari beberapa penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengemis adalah orang yang tidak memiliki tujuan hidup karena kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidupnya dan menggantungkan hidupnya dari hasil belas kasihan oranglain. Pengemis tidak memiliki kemauan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Pengemis mendapatkan penghasilan dari orang-orang yang memberikan uang karena belas kasihan dengan cara meminta-minta. Faktor yang menyebabkan adanya pengemis ini ialah tidak memiliki keinginan untuk bekerja atau ingin mendapatkan uang tanpa perlu mempersulit diri. Pengemis biasanya berada di tempat umum yang ramai dilewati orang-orang, tidak jarang mereka akan

tinggal di sekitaran daerah tersebut. Kebanyakan dari mereka merupakan golongan yang berada di kelas bawah dan harus mendapatkan pembinaan dari pemerintah setempat.

1.7.4 Permasalahan Kesejahteraan Sosial

Dari beberapa pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan keluarganya dan tidak mendapatkan hak-haknya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebelumnya, dapat disimpulkan pengertian PMKS yaitu, seseorang yang mengalami permasalahan sosial dari berbagai aspek kehidupan ber sosialnya seperti gelandangan, pengemis, pemulung, tuna susila.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) harus hidup dibawah garis kemiskinan karena keterbatasan kemampuan diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. PMKS merupakan fokus utama permasalahan yang ditangani pemerintah dalam bidang sosial.

1.8 Definisi Operasional

1.7 Definisi Operasional

No.	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Ketepatan Sasaran Program	- Sasaran Program - Waktu - Pendataan	- Sasaran program: gelandangan dan pengemis yang terjaring razia. - Pelaksanaan razia dilakukan setiap ada keluhan atau laporan dari masyarakat setempat. - Pengumpulan informasi gelandangan dan pengemis yang terjaring razia.

2.	Sosialisasi Program	<ul style="list-style-type: none"> - Orasi - Pertunjukan - Pelatihan dan Pembinaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Himbauan/peringatan pertama bagi gelandangan dan pengemis. - Sanksi bagi gelandangan dan pengemis yang tetap melaksanakan kegiatannya. - Memberikan pelatihan berupa keterampilan (tata boga, perbengkelan, dan elektro)
3.	Tujuan Program	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan jumlah gelandangan dan pengemis 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengurangi pertumbuhan gelandangan dan pengemis
4.	Pemantauan Program	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi terhadap program 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan inspeksi terhadap petugas atau staff yang bertanggung jawab membina gelandangan dan pengemis. - Evaluasi setiap 1 tahun sekali mengenai kinerja staf yang menangani permasalahan gelandangan dan pengemis.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan tehnik pendekatan Kualitatif Deskriptif. Menurut (Kriyanto dalam Akhmad, 2015) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan memvisualisasikan arti dari data-data yang telah terkumpul dengan memberikan perhatian dan merekam berbagai aspek terhadap situasi yang diteliti saat itu, sehingga menghasilkan gambaran secara menyeluruh mengenai keadaan sebenarnya. Peneliti mengelola data dengan cara mendeskripsikan data-data yang telah di peroleh di lapangan dalam bentuk lisan maupun data-data tertulis dari perilaku dan orang-orang yang dapat diamati. Menurut (Raco, 2018) tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk melihat efektif tidaknya suatu program atau kebijakan.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang akan digunakan untuk penelitian yaitu berada di Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur. Pemilihan lokasi ini disebabkan belum ada penelitian yang berfokus terhadap penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kutai Timur.

1.9.3 Unit Analisa

Penelitian ini berfokus terhadap efektifitas program Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kutai Timur.

1.9.4 Data dan Teknik Pengumpulan Data

A. Data

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data Primer ini diperoleh melalui sumber narasumber yang dikumpulkan dengan cara wawancara.

Tabel 1.7 Data Primer

No	Data Primer	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Efektivitas Program penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kutai Timur.	Kepala Badan Penyusun Program	Wawancara
2.	Efektivitas Program dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program penanganan gelandangan dan pengemis di	Kepala Seksi Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.	Wawancara

	Kabupaten Kutai Timur		
3.	Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program penanganan gelandangan dan pengemis di Kabupaten Kutai Timur	Staff Progam Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.	Wawancara
4.	Efektivitas Program Penangan dan Pengemis di Kabupaten Kutai Timur	Penerima program Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.	Wawancara

2. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari internet, jurnal-jurnal, arsip-arsip.

Tabel 1.8 Data Sekunder

No.	Data Sekunder	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Rekap Data Gelandangan dan Pengemis	Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur	Dokumentasi
2.	Rekap Data Kemiskinan di Kutai Timur (2015-2020)	Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kutai Timur	Dokumentasi

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik dalam pengumpulan data dengan cara melakukan sesi tanya jawab dengan narasumber yang telah ditentukan dengan tujuan untuk memperoleh fakta dari sudut pandang narasumber dengan cara direkam maupun dicatat. Sedangkan maksud dari wawancara menurut (Danial, 2015) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Sedangkan menurut (Moleong dalam Danial, 2015) wawancara adalah percakapan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interview) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang diberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Tabel 1.9 Wawancara

No	Narasumber	Jumlah Narasumber
1.	Kepala Badan Penyusun Program	1 Orang
2.	Kepala Seksi Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.	1 Orang
3.	Staff Progam Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.	1 Orang
4.	Penerima program Rehabilitasi Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur.	4 Orang

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data yang sudah ada dan merupakan dokumen yang telah disimpan oleh lembaga atau instansi guna keperluan untuk perekapan.

1.9.5 Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelolah suatu data untuk menghasilkan informasi baru agar data yang disajikan menjadi lebih muda dipahami dan berguna untuk menjadi solusi dalam suatu permasalahan, terkhusus yang berhubungan dengan penelitian. Menurut (Sugiyono dalam Wibowo & Andreani, 2012) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.